



Analisis Penerapan Sdgs Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi

Najmatul Haya Zen¹, Lince Mageiasti², Yulhendri³

Magister Administrasi Public, Universitas Negeri Padang
Najmatulhaya5@gmail.com, lincemagriasti@fis.unp.ac.id

Abstrak

Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs memiliki 17 tujuan utama yang bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim, serta pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian SDGs. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menganalisis data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan meluncurkan berbagai program di sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Kebijakan ini telah menunjukkan dampak positif, seperti peningkatan akses pendidikan, penurunan angka kemiskinan, dan upaya mitigasi perubahan iklim. Namun, implementasi SDGs di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antarlembaga, disparitas regional, keterbatasan pendanaan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Tantangan lain yang dihadapi adalah lemahnya penegakan hukum lingkungan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan resistensi terhadap kebijakan seperti pajak karbon. Pandemi COVID-19 juga memperburuk pencapaian SDGs, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif. Diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, serta optimalisasi peran sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung implementasi SDGs untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: *Sustainable Development Goals* (SDGs), Pembangunan Berkelanjutan, dan Kebijakan Pemerintah

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), adalah sebuah agenda global yang dirumuskan dan disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Agenda ini bertujuan untuk memberikan arah bagi pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan holistik. SDGs mencakup 17 tujuan utama yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan global yang kompleks, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, perubahan iklim, serta perlunya menjaga keberlanjutan pembangunan.

Berbeda dengan pendekatan pembangunan sebelumnya, SDGs menawarkan kerangka kerja yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga memberikan perhatian yang sama besar terhadap kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini mencerminkan komitmen internasional untuk tidak meninggalkan satu pun individu atau kelompok dalam perjalanan menuju pembangunan global yang lebih baik (Kemenkes RI, 2017).

Komitmen Indonesia terhadap implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tercermin dari upaya nyata untuk mengintegrasikan agenda global ini ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penyalarsan SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang disusun dan diimplementasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). RPJMN berfungsi sebagai pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mencakup berbagai aspek prioritas yang sesuai dengan tujuan SDGs (Musrafiyan, 2021).

Aspek-aspek tersebut meliputi pengentasan kemiskinan (SDG 1), peningkatan kualitas pendidikan (SDG 4), penguatan kesetaraan gender (SDG 5), serta penanganan perubahan iklim (SDG 13). Dengan menyalarskan kebijakan nasional pada berbagai sektor dengan tujuan-tujuan ini, Indonesia menunjukkan tekadnya untuk mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain langkah pemerintah, keterlibatan multipihak juga menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia. Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat luas untuk memastikan implementasi SDGs berjalan efektif dan inklusif. Kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan terciptanya solusi yang inovatif, relevan, dan berdampak luas. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya

berkomitmen untuk mencapai target pembangunan nasional yang berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan agenda global SDGs.

Meskipun demikian, implementasi SDGs di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Tingkat kemiskinan di Indonesia, meskipun telah menurun dari tahun ke tahun, masih menjadi isu krusial. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023 masih berada di angka sekitar 9,36%. Selain itu, kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas masih terlihat, terutama di daerah-daerah terpencil. Sementara itu, di bidang lingkungan, Indonesia menghadapi masalah serius terkait deforestasi, degradasi lahan, dan emisi karbon, yang berdampak pada pencapaian target SDG 13 dan SDG 15 (Rahmawati et al., 2024).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah koordinasi antar lembaga pemerintah dalam implementasi SDGs. SDGs melibatkan berbagai sektor yang saling berhubungan, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antar lembaga. Namun, dalam praktiknya, kurangnya koordinasi sering kali menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, alokasi anggaran untuk program-program pembangunan berkelanjutan masih belum optimal, mengingat kebutuhan yang besar untuk mencapai semua target SDGs (S. Hidayat, 2024).

Pandemi COVID-19 juga menjadi faktor yang memperumit pencapaian SDGs di Indonesia. Krisis kesehatan global ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan (Eka Suyanti et al., 2024). Di sektor pendidikan, pandemi memaksa jutaan siswa untuk beralih ke pembelajaran daring, yang sayangnya tidak dapat diakses oleh semua siswa secara merata. Dampak pandemi ini menunjukkan bahwa pencapaian SDGs memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan (Hendriyani et al., 2021).

Mengingat tantangan-tantangan tersebut, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah Indonesia berkontribusi pada pencapaian SDGs. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dampak kebijakan yang telah diterapkan, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dan mencari solusi yang efektif.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis berbagai kebijakan strategis yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Beberapa kebijakan tersebut meliputi program-program yang difokuskan pada pengurangan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, penguatan sistem kesehatan masyarakat, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini, termasuk keterbatasan sumber daya yang tersedia, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan adanya resistensi dari masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* untuk menganalisis peran kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi dari organisasi internasional, sehingga memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami konteks kebijakan yang ada. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah diterapkan dengan merujuk pada studi-studi sebelumnya dan data yang tersedia, sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam. Dalam analisis ini, peneliti mengidentifikasi kebijakan-kebijakan strategis yang relevan dengan target-target SDGs, mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mendukung pencapaian SDGs di Indonesia, serta memperkuat komitmen negara terhadap pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Terkait SDGs di Indonesia

Kebijakan pemerintah terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan global. Dalam pembahasan sebelumnya, narasi yang diuraikan telah menyoroti bagaimana pemerintah mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), disertai dengan program-program spesifik di sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk memperluas perspektif, analisis kebijakan berdasarkan berbagai penelitian menambahkan dimensi baru yang memperkuat pemahaman kita terhadap upaya dan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam pencapaian SDGs.

a. Dimensi Pendidikan dan Pembangunan Karakter (SDG 4)

Pendidikan berkualitas merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG) keempat, yang berfokus pada memastikan pendidikan inklusif, merata, dan bermutu bagi semua. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis, salah satunya adalah Program Indonesia Pintar (PIP)

yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan memberikan bantuan keuangan guna mendukung mereka menyelesaikan jenjang pendidikan. Selain itu, pemerintah juga mengandalkan landasan hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi pedoman dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Undang-undang ini menekankan pentingnya prinsip keadilan dan pemerataan, sehingga pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marjinal. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial melalui penyediaan pendidikan yang layak, merata, dan berdaya saing.

Menurut Safitri et al. (2022) pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal akses dan kualitas di daerah terpencil. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan distribusi guru dan infrastruktur pendidikan, kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi isu utama yang perlu ditangani. Di banyak daerah terpencil, akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas, dengan kurangnya fasilitas yang memadai dan ketersediaan tenaga pengajar yang terlatih. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh pendidikan yang layak, sehingga menghambat potensi mereka untuk berkembang. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi keluarga di daerah tersebut juga berkontribusi pada rendahnya angka partisipasi pendidikan.

Lebih lanjut, Marlinda (2023) pendidikan bukan hanya alat untuk meningkatkan kompetensi ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun karakter individu. Dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs), pembangunan karakter ini mencakup penanaman nilai-nilai keberlanjutan, toleransi, dan tanggung jawab sosial yang esensial untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kurikulum yang mendukung pencapaian nilai-nilai tersebut, dengan memasukkan pendidikan berbasis lingkungan dan keberlanjutan ke dalam program pembelajaran. Ini tidak hanya akan memberikan siswa pengetahuan yang relevan tentang tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi dunia saat ini, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjadi agen perubahan di masa depan. Pendidikan harus dipandang sebagai pilar fundamental dalam membentuk generasi yang tidak hanya kompeten secara ekonomi, tetapi juga sadar akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga mendukung pencapaian SDGs secara menyeluruh.

b. Dimensi Lingkungan dan Peran Generasi Muda (SDG 13 dan SDG 15)

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis dengan mengadopsi berbagai kebijakan penting yang sejalan dengan komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah signifikan adalah penerapan moratorium izin pembukaan hutan primer dan lahan gambut, yang bertujuan untuk menekan angka deforestasi serta mencegah kerusakan lebih lanjut pada ekosistem kritis tersebut. Kebijakan ini tidak hanya menjadi upaya nyata untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi langsung pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG), khususnya SDG 13 yang berfokus pada tindakan terhadap perubahan iklim dan SDG 15 yang berorientasi pada perlindungan, restorasi, dan keberlanjutan ekosistem daratan. Dengan pendekatan ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat perannya dalam agenda global untuk mengatasi krisis iklim dan menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi.

Rachman (2024) menyoroti bahwa generasi muda memegang peranan penting dalam memperkuat implementasi kebijakan lingkungan, mengingat mereka memiliki potensi besar sebagai agen perubahan di tengah tantangan krisis lingkungan global. Melalui pendidikan, inovasi teknologi, dan gerakan sosial, generasi muda dapat mendorong terciptanya solusi kreatif yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah bersama lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan potensi ini dengan cara memasukkan isu-isu lingkungan ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, sehingga kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dapat ditanamkan sejak dini. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan komunitas lokal, dapat membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif lingkungan, seperti kampanye

penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan energi, kreativitas, dan semangat mereka, generasi muda dapat menjadi kekuatan pendorong utama dalam menciptakan perubahan yang berdampak luas dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Selain itu, Caputo et al. (2021) menekankan pentingnya peran institusi pendidikan tinggi dalam mendukung agenda keberlanjutan, mengingat kampus memiliki tanggung jawab strategis sebagai pusat inovasi, penelitian, dan pendidikan. Di Indonesia, sejumlah universitas telah mengambil langkah progresif dengan melaporkan praktik keberlanjutan mereka melalui platform internasional seperti UI *GreenMetric*, yang mengevaluasi kinerja kampus dalam aspek lingkungan, energi, pengelolaan limbah, transportasi, dan pendidikan keberlanjutan. Langkah ini mencerminkan adanya sinergi antara sektor pendidikan tinggi dan pemerintah dalam mengarusutamakan isu keberlanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Melalui inisiatif ini, kampus-kampus tidak hanya menjadi contoh nyata dalam penerapan prinsip keberlanjutan, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin yang sadar lingkungan dan mampu menghadapi tantangan global di masa depan. Kolaborasi ini semakin mempertegas bahwa pendidikan tinggi memiliki peran sentral dalam menciptakan perubahan sistemik yang mendukung keberlanjutan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

c. Dimensi Sosial: Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial (SDG 1 dan SDG 8)

Kemiskinan merupakan salah satu isu mendasar yang menjadi tantangan utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan SDG 1 (tanpa kemiskinan), pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program perlindungan sosial, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. PKH dirancang sebagai bantuan tunai bersyarat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan sekaligus mendorong akses mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, Kartu Sembako memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin guna memenuhi kebutuhan gizi mereka. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, serta memperkuat ketahanan mereka terhadap risiko ekonomi. Inisiatif ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Hidayat (2022) mencatat bahwa meskipun kebijakan ini menunjukkan hasil positif dalam menurunkan angka kemiskinan, tantangan koordinasi antar-lembaga dan penyalahgunaan anggaran masih menjadi kendala serius yang perlu diatasi. Koordinasi yang kurang efektif antara berbagai instansi pemerintah sering kali mengakibatkan tumpang tindih program dan pemborosan sumber daya, sementara penyalahgunaan anggaran dapat merugikan kelompok yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi yang transparan, guna memastikan efektivitas program-program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan. Dengan adanya sistem yang jelas dan akuntabel, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah, serta memastikan bahwa bantuan dan sumber daya yang dialokasikan benar-benar menjangkau dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja program, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

Selain itu, pandemi COVID-19 telah menguji ketahanan kebijakan sosial di Indonesia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Agustino mencatat bahwa pendekatan kebijakan yang lebih deliberatif dan inklusif diperlukan untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul akibat pandemi. Kebijakan sosial yang adaptif menjadi kunci untuk mendukung kelompok-kelompok yang paling terdampak, seperti pekerja informal dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah, pemerintah dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, serta memperkuat jaringan perlindungan sosial yang ada. Pendekatan ini tidak hanya akan memberikan bantuan yang diperlukan, tetapi juga mendorong ketahanan komunitas dalam menghadapi krisis di masa depan (Agustino, 2020).

d. Dimensi Energi dan Pengelolaan Sumber Daya (SDG 7 dan SDG 11)

Kebutuhan energi yang terus meningkat menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam mendukung transisi ke energi bersih. Dalam upaya mencapai Sustainable Development Goal (SDG) 7, yang berfokus pada energi bersih dan terjangkau, kebijakan energi terbarukan, seperti pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan kendaraan listrik, menjadi langkah penting yang harus diambil. Namun, Qodri (2023)

mencatat bahwa implementasi kebijakan ini masih kurang maksimal, terutama disebabkan oleh keterbatasan insentif bagi produsen dan konsumen kendaraan listrik. Tanpa insentif yang memadai, adopsi teknologi energi bersih akan terhambat, dan masyarakat serta industri mungkin akan ragu untuk berinvestasi dalam solusi yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih proaktif untuk mendorong investasi di sektor energi terbarukan, termasuk pemberian insentif fiskal, subsidi, dan program edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat penggunaan energi bersih. Dengan memperkuat dukungan bagi produsen dan konsumen, Indonesia dapat mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan dan memastikan akses yang lebih luas terhadap sumber energi bersih.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi fokus penting dalam mencapai Sustainable Development Goal (SDG) 11, yaitu kota dan komunitas berkelanjutan. Lubis menekankan bahwa kebijakan pengelolaan limbah dan sampah, terutama di kota-kota besar, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah telah meluncurkan program “Indonesia Bebas Sampah 2025,” yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan meningkatkan pengelolaan limbah. Namun, tantangan dalam implementasi program ini mencakup kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah serta infrastruktur pengelolaan limbah yang masih belum memadai (Lubis, 2023).

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia merupakan sebuah upaya penting dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks dan beragam. Sejak diadopsinya SDGs oleh PBB pada tahun 2015, negara-negara anggota, termasuk Indonesia, telah berkomitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, yang mencakup penghapusan kemiskinan, kesetaraan gender, akses pendidikan yang berkualitas, perlindungan lingkungan, dan banyak lagi. Namun, perjalanan menuju pencapaian tujuan-tujuan ini tidaklah mudah dan sering kali dipenuhi dengan berbagai rintangan.

Indonesia mempunyai keragaman suku, budaya, dan kondisi ekonomi yang sangat kaya. Keberagaman ini menciptakan tantangan unik dalam implementasi kebijakan, di mana setiap daerah memiliki kebutuhan dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal agar kebijakan yang dirumuskan dapat benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, sering kali kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan realitas di lapangan, sehingga terjadi kesenjangan antara tujuan yang ditetapkan dan hasil yang dicapai.

a. Tantangan di Bidang Pendidikan

Salah satu sasaran utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah menjamin akses terhadap pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, yang tercantum dalam SDG 4. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan sistem pendidikan, tantangan yang dihadapi tetap signifikan, terutama di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil, di mana mutu pendidikan masih rendah. Safitri et al. (2022) mencatat bahwa terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini diperburuk oleh kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih.

Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik masih minim. Menurut Nurfatimah et al. (2022), pendidik sering kali tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk mengikuti pelatihan berkelanjutan. Akibatnya, mereka kesulitan untuk mengadopsi metode pembelajaran inovatif yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Masalah ini tidak hanya menghambat pencapaian SDG 4, tetapi juga memengaruhi upaya untuk mengatasi kemiskinan (SDG 1) dan ketidaksetaraan (SDG 10).

b. Tantangan dalam Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dianggap sebagai syarat fundamental untuk memastikan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Meskipun demikian, sektor pemerintahan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat proses ini. Hambatan-hambatan tersebut mencakup masalah struktural dalam organisasi, kurangnya transparansi, serta rendahnya akuntabilitas yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, resistensi terhadap perubahan di kalangan aparatur sipil dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penghalang yang signifikan. Hanjani (2024) menyoroti bahwa upaya penyederhanaan birokrasi sering kali terhalang oleh budaya organisasi yang resistif terhadap perubahan. Sebagai contoh, di Kementerian Pertanian, banyak pegawai yang masih skeptis terhadap inovasi, sehingga proses reformasi berjalan lambat.

Selain itu, Abdussamad (2024) mencatat bahwa kurangnya kepemimpinan politik yang kuat dan dukungan untuk inisiatif e-government menghambat adopsi teknologi dalam pelayanan publik, meskipun teknologi seharusnya dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi pemerintahan; tanpa dukungan politik yang memadai, inisiatif ini sulit untuk diimplementasikan secara efektif, dan situasi ini diperparah dengan reformasi birokrasi yang stagnan, yang mengakibatkan kebijakan terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs)

tidak dapat diterapkan secara optimal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan komitmen yang lebih besar dari para pemimpin politik untuk mendukung dan mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik, serta investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor publik agar pegawai pemerintah memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengadaptasi teknologi baru; dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi inisiatif e-government dapat menjadi lebih efektif, sehingga mendukung pencapaian SDGs dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat secara keseluruhan.

c. Koordinasi Antar Lembaga

Pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang sering kali beroperasi secara terpisah. Kurangnya koordinasi antar lembaga ini menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan. Ketidaksielarasan dalam tujuan dan strategi antar instansi mengakibatkan duplikasi usaha dan pemborosan sumber daya, serta menghambat efektivitas program yang dirancang untuk mencapai target-target SDGs. Selain itu, perbedaan visi dan misi antar lembaga dapat memperumit proses kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang sinergis. Siahaan (2023) mencatat bahwa tumpang tindih tugas dan wewenang antar lembaga sering kali menyebabkan kebingungan dan pemborosan sumber daya. Selain itu, banyak program yang berjalan tanpa sinergi, sehingga hasil yang dicapai menjadi tidak maksimal.

Dalam konteks pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kencono (2024) mencatat bahwa Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia masih terbatas, dan hal ini menjadi kendala signifikan dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis digital yang efektif dan efisien; tanpa adanya integrasi data yang baik dan infrastruktur yang memadai, sulit bagi pemerintah untuk menyampaikan layanan publik secara optimal dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Keterbatasan ini tidak hanya menghambat adopsi teknologi baru, tetapi juga mengurangi kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Penting untuk meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur TIK, termasuk jaringan internet yang lebih kuat dan sistem pengelolaan data yang terintegrasi, guna mendukung transformasi digital yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

d. Tantangan Sosial dan Budaya

Aspek sosial dan budaya memiliki peranan krusial dalam pelaksanaan kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di Indonesia, masalah ketidaksetaraan sosial dan diskriminasi masih menjadi tantangan yang signifikan, berdampak langsung pada pencapaian SDG 10 yang berfokus pada pengurangan ketidaksetaraan. Berbagai faktor, seperti perbedaan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan layanan kesehatan, memperkuat kesenjangan yang ada di masyarakat. Selain itu, norma dan nilai budaya yang mendiskriminasi kelompok tertentu kerap menghambat upaya untuk mencapai kesetaraan. Dalam konteks pengembangan pariwisata berkelanjutan, Pratama (2023) mencatat bahwa konflik antar komunitas dan perbedaan budaya dapat menghambat upaya untuk menciptakan destinasi wisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan kebijakan sering kali menyebabkan program-program yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka, sehingga menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat; oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan, mulai dari pengumpulan informasi dan pemetaan masalah hingga evaluasi hasil, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan didukung oleh semua pihak. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah tidak hanya dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan sesuai dengan konteks lokal, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebijakan tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program yang diterapkan.

e. Penegakan Hukum dan Lingkungan

Dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs) 13 yang berkaitan dengan perubahan iklim dan SDG 15 yang berfokus pada kehidupan di darat, tantangan utama yang dihadapi adalah lemahnya penegakan hukum lingkungan. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan, implementasi dan penegakan hukum sering kali tidak berjalan efektif. Situasi ini diperparah oleh kurangnya sumber daya yang memadai, ketidakcukupan dalam pelatihan aparat penegak hukum, serta adanya tekanan politik dan ekonomi yang dapat memengaruhi keputusan terkait penegakan hukum. Akibatnya, praktik-praktik yang merusak lingkungan, seperti deforestasi ilegal dan pencemaran, terus terjadi, mengancam keberlanjutan ekosistem dan memperburuk perubahan iklim. Judijanto (2023) menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum lingkungan di Indonesia cukup komprehensif, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya dan korupsi. Penegakan

hukum yang lemah membuat aktivitas ilegal, seperti penebangan hutan dan pencemaran lingkungan, tetap berlangsung.

Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti masyarakat adat dan pengungsi, juga kurang mendapat perhatian, sehingga menciptakan ketidakadilan sosial yang signifikan. Bintarawati (2023) mencatat bahwa ketidakadilan sosial yang dialami oleh kelompok-kelompok ini menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan yang berkelanjutan. Ketidakadilan ini tidak hanya mengisolasi mereka dari proses pengambilan keputusan, tetapi juga membatasi akses mereka terhadap sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan perspektif dan kebutuhan kelompok rentan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga proses pembangunan dapat lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada kelompok-kelompok ini, pemerintah dapat memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan.

f. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Meskipun demikian, kebijakan seperti pajak karbon sering kali menghadapi tantangan signifikan dalam hal penerimaan masyarakat. Banyak individu dan kelompok yang merasa terbebani oleh kebijakan tersebut, terutama jika mereka tidak memahami manfaat jangka panjangnya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ketidakpastian mengenai penggunaan pendapatan dari pajak karbon juga dapat menimbulkan skeptisisme. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pengurangan emisi karbon serta dampaknya terhadap perubahan iklim turut berkontribusi pada penolakan kebijakan ini. Tjoanto & Tambunan (2022) mencatat bahwa masyarakat sering kali tidak memahami manfaat jangka panjang dari kebijakan ini, sehingga resistensi terhadap pelaksanaannya cukup tinggi.

Selain itu, Setiawan (2023) menyoroti bahwa pemanfaatan teknologi untuk pemantauan lingkungan, seperti jaringan sensor nirkabel, masih sangat terbatas, sehingga menghambat efektivitas dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Tanpa teknologi yang memadai, sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kondisi lingkungan, yang sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap tantangan lingkungan yang ada. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan keputusan yang diambil tidak didasarkan pada analisis yang komprehensif, yang pada gilirannya dapat memperburuk masalah lingkungan dan menghambat upaya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi pemantauan yang lebih baik dan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan data lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

Tantangan dalam implementasi kebijakan SDGs di Indonesia sangat beragam dan saling terkait. Dari masalah pendidikan hingga reformasi birokrasi, koordinasi antar lembaga, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya alam, semua faktor ini memerlukan pendekatan yang holistik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, diharapkan tujuan-tujuan SDGs dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dampak Kebijakan terhadap Target SDGs

Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai target-target SDGs, tetapi juga berkontribusi pada perubahan struktural di dalam masyarakat.

a. Dampak Kebijakan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang berfokus pada pengembangan UMKM menjadi sangat krusial, terutama dalam konteks pemulihan setelah pandemi COVID-19. Di tengah tantangan yang dihadapi selama periode sulit ini, pemerintah memperkenalkan berbagai inisiatif, termasuk penyediaan bantuan finansial, pelatihan manajerial, serta peningkatan akses ke pasar digital. Sebagaimana dinyatakan oleh Sugiri (2020), langkah-langkah ini tidak hanya berfungsi untuk membantu UMKM bertahan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat lokal. Melalui dukungan yang diberikan, UMKM memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini selanjutnya berkontribusi pada pencapaian SDG 8, yang berfokus pada penyediaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan UMKM bukan hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.

b. Kebijakan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan kunci untuk mencapai berbagai target SDGs, terutama yang terkait dengan lingkungan. Kebijakan seperti penerapan green building di Indonesia menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pencapaian SDG 11, yang berfokus pada kota dan komunitas yang berkelanjutan. Chaerani (2024) menyoroti bahwa meskipun implementasi green building masih terfokus pada daerah perkotaan, kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur mulai meningkat. Ini mencakup penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan air yang lebih baik, dan efisiensi energi. Dengan mengadopsi praktik ini, pemerintah tidak hanya dapat mengurangi jejak karbon, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung kesehatan publik, dan melindungi keanekaragaman hayati.

c. Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia memainkan peran krusial dalam stabilitas ekonomi dan pencapaian SDGs. Kebijakan ini mencakup pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan pengaturan suku bunga. Menurut Chaerani (2024), Stabilitas ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan moneter yang efektif sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya penghapusan kemiskinan (SDG 1) dan ketahanan pangan (SDG 2), menjaga inflasi tetap rendah merupakan kunci untuk menciptakan fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Kebijakan moneter yang bijaksana tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga berperan dalam menjaga daya beli masyarakat, yang langsung berpengaruh pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Ketika inflasi terkendali, masyarakat dapat merencanakan pengeluaran mereka dengan lebih baik, karena harga barang dan jasa tidak berfluktuasi secara drastis. Dalam situasi di mana inflasi tinggi, daya beli masyarakat akan tergerus, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, dan pendidikan. Dengan inflasi yang rendah, masyarakat memiliki lebih banyak ruang untuk berinvestasi dalam kesehatan dan pendidikan, yang pada gilirannya membantu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas mereka.

Dalam konteks ketahanan pangan, stabilitas harga pangan sangat penting. Ketika inflasi rendah dan harga pangan stabil, produsen dan petani akan lebih termotivasi untuk meningkatkan produksi mereka. Mereka dapat merencanakan produksi dengan lebih baik, berinvestasi dalam teknologi baru, dan memperbaiki praktik pertanian. Hal ini tidak hanya meningkatkan pasokan pangan, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan petani, yang sering kali merupakan kelompok rentan yang paling terpengaruh oleh fluktuasi harga.

Stabilitas ekonomi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Ketika investor merasa yakin bahwa inflasi akan tetap terkendali dan bahwa kebijakan moneter akan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, mereka cenderung berinvestasi lebih banyak dalam proyek-proyek jangka panjang. Investasi ini sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan memacu inovasi. Sektor swasta yang kokoh memberikan sumbangsih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja.

Di sisi lain, ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan investasi, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam situasi ini, pemerintah harus bertindak cepat dan efektif untuk mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter yang tepat, seperti penyesuaian suku bunga atau pengendalian jumlah uang beredar. Kebijakan tersebut harus diimbangi dengan upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa kebijakan moneter tidak dapat berdiri sendiri dalam mencapai SDGs. Diperlukan kerjasama yang erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang mencakup pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial dan infrastruktur. Investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan memperkuat daya saing ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan cara ini, kebijakan moneter yang efektif dapat berfungsi sebagai pendorong bagi kebijakan lain yang mendukung pencapaian SDGs.

d. Desentralisasi dan Pembangunan Lokal

Desentralisasi merupakan kebijakan penting yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan pembangunan lokal. Suriadi (2024) menjelaskan bahwa desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, yang merupakan elemen kunci dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki wewenang dan fleksibilitas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang

sesuai dengan kondisi dan prioritas lokal, sehingga meningkatkan efektivitas program-program pembangunan. Misalnya, daerah yang rawan bencana dapat mengembangkan program mitigasi yang lebih kuat dan tepat sasaran, seperti sistem peringatan dini dan infrastruktur yang tahan bencana, yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam. Di sisi lain, daerah yang kaya akan sumber daya alam dapat mendorong praktik pembangunan berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan konservasi lingkungan, yang tidak hanya melindungi ekosistem tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Dengan memberikan otonomi kepada daerah, desentralisasi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, di mana masyarakat lokal dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pemerintah, sehingga menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek-proyek tersebut, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas dan harapan masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih efektif dan menyeluruh.

e. Penanganan Isu Sosial dan Keadilan

Tantangan dalam implementasi kebijakan juga menjadi perhatian penting, terutama dalam konteks penanganan isu sosial seperti pengungsi Rohingya. Syarifuddin (2023) mencatat bahwa meskipun pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan, tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga dan keterlibatan masyarakat masih menjadi hambatan dalam mencapai SDG 16, yang berfokus pada perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Kebijakan yang efektif dalam menangani isu pengungsi memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Dengan meningkatkan koordinasi dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, pemerintah dapat lebih baik melindungi hak-hak pengungsi dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.

f. Inovasi dalam Sektor Keuangan

Sektor teknologi finansial (FinTech) telah berkembang pesat di Indonesia dan berkontribusi pada inklusi keuangan. (Alfiana, 2023) menyatakan bahwa kebijakan pengembangan produk FinTech memberikan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Melalui penggunaan aplikasi dan platform digital, masyarakat kini dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, termasuk pinjaman, tabungan, dan investasi. Ini sangat penting untuk mencapai SDG 8, yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan akses ke layanan keuangan, kebijakan ini tidak hanya membantu individu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam perekonomian lokal.

g. Kebijakan Pajak Karbon dan Perubahan Iklim

Kebijakan pajak karbon di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk mendukung pencapaian SDG 13 tentang perubahan iklim. Tjoanto & Tambunan (2022) mencatat bahwa meskipun ada tantangan dalam implementasi kebijakan ini, pajak karbon dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, kebijakan ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam sektor energi terbarukan. Kebijakan yang mendukung inovasi dan investasi dalam teknologi hijau akan membantu Indonesia bertransisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, sekaligus memenuhi komitmen internasional dalam menghadapi perubahan iklim.

h. Kebijakan Pendidikan dan Peningkatan Kualitas

Kebijakan Merdeka Belajar yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Lembong (2023) menjelaskan bahwa meskipun ada tantangan dalam infrastruktur pendidikan, kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi guru dan siswa untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan. Dengan menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan keterampilan, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya penting untuk pencapaian SDG 4, tetapi juga menjadi fondasi untuk mencapai tujuan-tujuan lain dalam SDGs, karena pendidikan yang baik akan meningkatkan kemampuan individu dalam berkontribusi kepada masyarakat.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap pencapaian SDGs di Indonesia sangat beragam dan saling terkait. Dari dukungan terhadap UMKM hingga penerapan kebijakan lingkungan dan pendidikan, semua faktor ini berkontribusi pada upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan tetap ada, dan diperlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dan inklusif untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat terlibat dalam proses pencapaian SDGs. Keberhasilan pencapaian SDGs bergantung pada komitmen dan kolaborasi

antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta pada upaya untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah diimplementasikan melalui berbagai program strategis, seperti pengintegrasian SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pelibatan beragam pemangku kepentingan, serta alokasi anggaran yang difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Meskipun demikian, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, termasuk kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga, disparitas yang terlihat di tingkat regional, keterbatasan dalam pendanaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya SDGs. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, serta mengoptimalkan peran sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung implementasi SDGs. Selain itu, pelaksanaan kampanye edukasi yang menyeluruh dan transparansi dalam proses pelaksanaan kebijakan menjadi langkah krusial untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan semua elemen masyarakat dapat lebih memahami dan berkontribusi aktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2024). E-Government Di Indonesia: Sebuah Analisis Bibliometrik Dan Dampaknya Pada Pengembangan Kajian Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 15. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.111>
- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685>
- Alfiana, A. (2023). Analisis Kualitatif Kebijakan Pengembangan Produk FinTech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Dan Perilaku Konsumen Di Indonesia. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 2(01), 28–37. <https://doi.org/10.58812/sak.v2i01.253>
- Bintarawati, F. (2023). Tantangan Dan Prospek Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia Dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(12). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.871>
- Caputo, F., Ligorio, L., & Pizzi, S. (2021). The Contribution of Higher Education Institutions to the SDGs—An Evaluation of Sustainability Reporting Practices. *Administrative Sciences*, 11(3), 97. <https://doi.org/10.3390/admsci11030097>
- Chaerani, E. Y. (2024). Kebijakan Dan Penerapan Green Building Di Indonesia: Suatu Tinjauan. *Jurnalku*, 4(1), 68–78. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.674>
- Eka Suyanti, Indra Afrita, & Silm Oktapani. (2024). Pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7123–7130.
- Hanjani, A. (2024). Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Penyetaraan Jabatan Fungsional Di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Jiap (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jiap.v12i1.21257>
- Hendriyani, M., Artini, N. M., & Tatyana. (2021). Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Keuangan PDAM. *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Dunia Pendidikan*, 10(2), 13–21. <https://ejournal.swadharma.ac.id/index.php/kompleksitas/article/view/128/0>
- Hidayat, A. D. (2022). Implementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Papatung Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 55–62. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.624>
- Hidayat, S. (2024). Legacy Pemimpin Besar Islam : Inspirasi untuk Kepemimpinan Modern di Indonesia pada Sustainable Development Goals (SDGs). *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.38073/pelita.v2i1.1865>
- Judijanto, L. (2023). Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Di Bandung. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(12), 1201–1209. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.874>
- Kemenkes RI. (2017). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)*. Kemenkes RI.
- Kencono, B. D. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan Dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Indonesia. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498–1506. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Lembong, J. M. (2023). Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Educatio*

- Fkip Unma*, 9(2), 765–777. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>
- Lubis, R. L. (2023). Upcycling Kriya “Chilaz Craft” Untuk SDG Target 11.6 Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (Pkm-Csr)*, 6, 1–8. <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v6i0.2177>
- Marlinda, S. (2023). Analisis Pengaruh Kemajuan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Pembangunan Pendidikan Karakter: Suatu Kajian Dalam Konteks Perubahan Sosial Global. *PGSD*, 1(2), 6. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i2.167>
- Musrafiyan, M. (2021). Potensi Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) halal Barsela sebagai destinasi pariwisata prioritas di era society 5.0. *Proceedings of International Conference on Islamic Studies “Islam & Sustainable Development*, 488–501. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/icis/article/view/12700>
- Nurfatimah, S. A., Hasna, S., & Rostika, D. (2022). Membangun Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6145–6154. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3183>
- Pratama, W. Y. (2023). Analisis Potensi Dan Tantangan Pengembangan Pariwisata Desa Di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 41. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.4657>
- Qodri, M. I. A. (2023). Emisi Energi Dan Kebijakan Kendaraan Listrik: Studi Komparasi Antara China Dan Indonesia. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 10(3), 133–144. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v10i3.48350>
- Rachman, I. (2024). Peran Generasi Muda Dalam Upaya Memahami Dan Menganalisis Isu-Isu Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Infomatek*, 26(1), 103–112. <https://doi.org/10.23969/infomatek.v26i1.14307>
- Rahmawati, A., Lubis, D. S., & Damisa, A. (2024). Determinasi Kemiskinan Di Sumatera Analisis Empiris Terhadap Faktor Demografi, Kesehatan, Pendidikan, Ipm, Dan Pdrb (2019–2023). *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 03(02).
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096–7106. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>
- Setiawan, Z. (2023). Mengoptimalkan Jaringan Sensor Nirkabel Dalam Aplikasi Monitor Lingkungan Dengan Teknologi IoT Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(10), 858–867. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i10.704>
- Siahaan, R. L. M. (2023). Perkembangan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis SDGs 4. *Indo-Mathedu Intellectuals Journal*, 4(2), 975–985. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.316>
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Suriadi, H. (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Syarifuddin, S. (2023). Analisis Kebijakan Negara Indonesia Dalam Penyelesaian Kasus Pengungsi Rohingya Dari Perspektif Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(12). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.870>
- Tjoanto, A. K., & Tambunan, M. R. (2022). Tantangan Dan Strategi Dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 9(02), 237–248. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.20>